



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6994 TAHUN 2018  
TENTANG  
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan sains, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global;
  - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memetakan tema-tema riset yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global selama kurun waktu tertentu dalam bentuk Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam tahun 2018 – 2029, dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018 – 2028 yang sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
TENTANG AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)  
2018 – 2028
- KESATU : Menetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)  
2018 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian  
keagamaan Islam di lingkungan Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan  
kerangka kebijakan pembangunan nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6994 TAHUN 2018 TENTANG  
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu dan agama di dunia. Melalui eksperimen demokrasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di atas garis kebijakan Nawa Cita, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai benturan normatif (*normative dissonance*) secara elegan dan menggabungkan rumpun ilmu keagamaan dan ilmu umum. Bagi Indonesia, Islam tidak perlu lagi dihadapkan dengan sistem politik negara-bangsa dan demokrasi, tetapi Islam sudah menjadi nafas yang memberikan panduan moral dan etik bagi Indonesia. Islam sekaligus menyatu ke dalam gerak kehidupan bersama warganya yang hidup dalam sebuah negara-bangsa berlandaskan Pancasila.

Di negeri ini, tidak ada hambatan apapun untuk menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang loyal, sekaligus bagian dari masyarakat dunia yang modern dan terglobalkan. Sangat wajar kondisi Islam, pluralisme agama dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dewasa ini telah menarik perhatian masyarakat dunia. Potensi ini perlu dirawat dengan baik karena menjadi bagian dari modal sosial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan tinggi dijadikan salah satu ujung tombaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”

Peran ini telah dijalankan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan cara terlibat langsung di dalam: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; serta (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sekalipun demikian, sekarang ini dan ke depannya PTKI memiliki tantangan besar untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Hal ini disebabkan; (1) masih besarnya hambatan untuk memperoleh tingkat pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia; (2) belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan nilai humaniora serta penjaminan kepatuhannya pada pendidikan tinggi; dan (3) kurang dianggapnya penelitian terutama dalam masalah komitmen pendanaan dan penghargaan. Kondisi ini jamak terjadi di pendidikan tinggi negeri atau swasta, umum maupun keagamaan, sebab secara umum bangsa Indonesia masih terjadi kelemahan dalam hal: (1) kapasitas dan kompetensi riset, (2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; (3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; (4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan (5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Secara umum bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya budaya dan literasi IPTEK. Akibatnya jamak ditemui beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset seperti personil riset (peneliti, perekayasa dan dosen), anggaran, dan fasilitas riset.

Dalam rangka mendorong pemajuan IPTEK dan meningkatkan kontribusi riset, sekarang ini pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045). RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai rencana induk sektoral yang lebih terstruktur dan berkekuatan hukum lebih tinggi (ditetapkan melalui Peraturan Presiden), RIRN dapat dipandang sebagai skema kebijakan, baik secara *bottom-up* maupun *top-down*. Agar lebih efektif dan efisien penetapan ranah riset dari setiap pelaku sesuai topik riset secara spesifik, juga telah dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk prioritas riset

nasional untuk periode 5 tahun. Namun, dari 10 (sepuluh) fokus riset yang dibuat hanya ada 1 (satu) fokus riset sosial humaniora yang mencakup luas sosial, ekonomi, politik, seni, budaya dan pendidikan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan upaya mengembangkan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, terlebih lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama dan integrasi Islam dan ilmu umum di dunia.

Atas dasar itu, Kementerian Agama terdorong untuk membuat Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. ARKAN juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan dengan memetakan tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu ARKAN disusun dalam jangka waktu 10 tahun, mulai 2018 sampai 2028 untuk memberikan tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).

### **C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi ARKAN 2018 – 2028 adalah Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global. Dengan adanya visi ARKAN 2018 – 2028, seluruh agenda-agenda riset yang akan dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian harus mengarah pada visi ARKAN 2018 - 2028.

Untuk mencapai visi di atas maka misi ARKAN 2018 - 2028 adalah:

1. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan; dan
4. Mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan.

Visi dan misi ini menjadi payung bagi seluruh penelitian yang dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari berbagai bidang, baik agama, sosial humaniora, sains, dan teknologi berbasis integrasi keilmuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ARKAN 2018 - 2028 diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya riset kemasyarakatan, keagamaan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Tercapainya kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Terealisasinya kebijakan-kebijakan publik pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan;
4. Terlaksananya riset inovatif yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan sasaran ARKAN 2018 - 2028, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya peneliti profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen riset, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian;
3. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten.
4. Meningkatnya keterlibatan peneliti dalam seminar/pertemuan/konferensi nasional dan internasional
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.

#### **D. Manfaat Penyusunan**

Penyusunan ARKAN 2018 - 2028 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional dalam bidang keagamaan. Sedangkan manfaat penyusunan ARKAN ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tema-tema penelitian keagamaan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan;
2. Memberikan panduan kepada peneliti, akademisi, praktisi, para pengambil kebijakan dan seluruh komponen bangsa dalam melakukan penelitian, mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dalam bidang keagamaan;
3. Memberikan acuan kepada lembaga penyelenggara penelitian, baik di lingkungan Kementerian Agama, maupun di lingkungan PTKI dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan.

#### **E. Metode Penyusunan**

Selain mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), tema penelitian prioritas Kementerian Agama RI disusun melalui mekanisme :

1. pengarahan narasumber dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian;
2. masukan tema-tema penelitian unggulan PTKI melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) PTKI se-Indonesia;
3. konsinyering pembahasan draft ARKAN di Tim Penyusun ARKAN Kementerian Agama RI; dan
4. visitasi PTKI untuk sosialisasi dan jaring pendapat.

Tema-tema penelitian dalam ARKAN 2018 - 2028 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria sebagai berikut :



1. tema penelitian merupakan tema yang digagas oleh Kementerian Agama RI termasuk di PTKI dan pusat-pusat penelitian;
2. tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan negara;
3. tema penelitian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan baik agama maupun umum;
4. tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik;
5. tema penelitian bernilai integrasi dengan pendekatan dari berbagai aspek keilmuan sehingga output yang didapatkan dapat lebih menyeluruh;
6. tema penelitian memiliki nilai output yang kompetitif baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik maupun paten;
7. tema penelitian memiliki indikator keberhasilan yang terukur;
8. tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tema penelitian unggulan dipilih berdasarkan kriteria di atas. Dalam pengembangan tema penelitian unggulan terdapat tema penelitian lebih kecil yang menunjang dan dijadikan sebagai sub-tema penelitian unggulan. Tema penelitian utama merupakan satu hal yang menjadi prioritas bersama sementara sub-tema penelitian unggulan bersifat lebih dinamis.

Untuk memperjelas capaian penelitian maka setiap tema penelitian unggulan dan sub-tema penelitian unggulan diberikan arahan target capaian per lima tahun selama 10 tahun sehingga kemajuan dan keberhasilan setiap tema dapat dievaluasi berdasarkan target capaian.

ARKAN 2018 - 2028 diharapkan dapat menghasilkan output secara nyata dan terukur dalam bentuk :

1. Hasil survey (data/big data);
2. Publikasi ilmiah;
3. Rekomendasi konsorsium;
4. Usulan kebijakan publik;
5. Standar/referensi teknis;
6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merk Dagang, Rahasia Dagang);
8. Varietas/ *strain*/prototipe baru;
9. *Pilot Project*; dan
10. *Start up company*.

## **BAB II**

### **ARKAN 2018 – 2028 DAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

#### **A. Posisi Riset Keagamaan Dalam Arus Global**

Masyarakat dunia sedang menghadapi berbagai tantangan. Terjadinya perubahan iklim global membuat suhu bumi makin panas. Kebakaran, gelombang panas, dan banjir terjadi di mana-mana. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kegagalan panen yang menyebabkan krisis makanan datang menghadang yang berujung pada berkurangnya ketahanan pangan. Hal ini semakin melengkapi kekhawatiran menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dihasilkan perut bumi. Di banyak negara, harga-harga kebutuhan pokok meningkat sehingga masyarakat kehilangan daya beli dan rantai produksi menjadi terhambat. Hal lain yang tidak kalah serius adalah terjadinya pengangguran yang semakin meluas, yang menghantam lapisan penduduk usia produktif, terutama kaum muda. Singkat kata, krisis ekonomi menghampiri masyarakat di berbagai kawasan dunia. Ketergantungan antar-negara yang makin meningkat menimbulkan efek berantai, yang akhirnya memicu krisis global. Di berbagai kawasan, kekhawatiran tentang suramnya masa depan semakin meningkat.

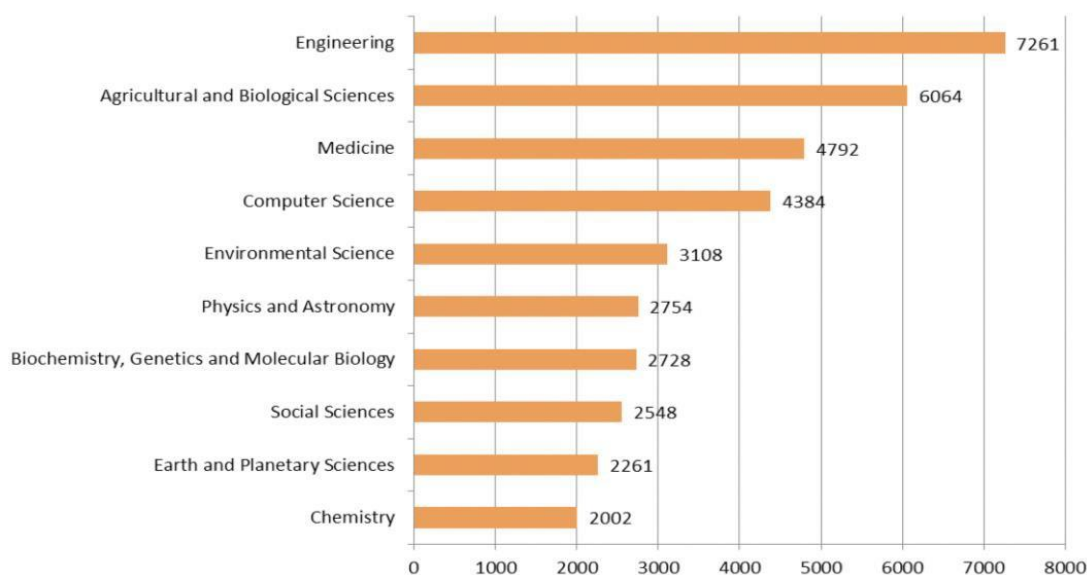
Tantangan selanjutnya adalah terpaan arus globalisasi, di mana banyak orang merasa kehilangan kontrol. Mereka berusaha mengedepankan politik identitas, menebar permusuhan, kekerasan dan teror atas nama agama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk tujuan politik dan ekonomi. Peristiwa 9/11 dan berbagai aksi pengeboman di seluruh dunia yang terjadi setelahnya mengirim pesan tentang ancaman nyata terorisme. Pada saat yang sama, gelombang populisme menyeruak di negara-negara Barat, memunculkan sentimen anti-imigran dan semangat ultra-nasionalisme. Perekonomian global yang terus memburuk menyebabkan populisme beresonansi semakin luas. Di kawasan lain, tuntutan perubahan yang makin kencang—di saat kompetisi memperebutkan akses ekonomi-politik meningkat tajam—mendorong konflik politik yang menghadirkan badai kekerasan dan penderitaan. Persoalan menjadi makin kompleks ketika konflik politik jalin-menjalin dengan manipulasi isu-isu dan sentimen keagamaan yang menyebar luas melalui media sosial sehingga berita palsu (hoax) menjadi menu sehari-hari.

Dunia Islam merasakan langsung dampak konflik semacam itu. Diawali gejolak politik di Tunisia, lalu Qaddafi dan Mubarak terjungkal, Bashar al-Assad harus berjuang keras meredam sergapan badai perubahan tersebut. Rezim Assad memang tetap berdiri, tetapi wilayah negeri penting di Timur Tengah yang menyimpan banyak warisan sejarah Islam ini telah terkoyak-koyak. Sebagian sudah jatuh ke dalam kontrol para pemberontak dan pasukan *the Islamic State of Iraq and the*

*Levant* (ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang terkenal ganas menebar teror menakutkan.

Gejolak politik yang menimbulkan rangkaian kekerasan dan pembunuhan merupakan fenomena yang muncul berulang-ulang (recurrent) di dunia Islam. Gejolak terus berlangsung, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad sampai hari ini ketika peradaban dunia telah bersepakat untuk menolak tegas kekerasan dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Pemicunya bermacam-macam, mulai perebutan tanah dan sumber daya ekonomi, pengaruh politik, persaingan antar-klan dan suku, masalah harga diri dan kebanggaan, sampai ketidakrelaan berbagi kekuasaan. Otoritarianisme mencengkeram, menyebabkan gagasan tentang demokrasi begitu sulit berkembang. Menariknya, agama selalu hadir dalam dinamika politik di dunia Islam sebagai sumber doktrin bagi klaim-klaim politik dan bingkai gerakan sosial.

Melihat perkembangan di atas, tidak mengherankan, lingkaran intelektual dan media massa Barat memandang Islam sebagai salah satu akar kuat permasalahan. Mereka pun melakukan kajian dan riset di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Dari kajian dan riset itu lahir persepsi baru bahwa masa depan Islam terdapat di Indonesia. Pengakuan ini tidak saja lahir dari kalangan Barat tetapi juga dari internal dunia Islam sendiri. Hanya saja pengakuan berdasarkan riset keagamaan ini belum diketahui secara massif karena “kalah populer” dibandingkan konsentrasi riset di bidang lainnya. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa riset keagamaan (dimasukkan dalam kategori *social science*) dianggap kurang populer.



Grafik 2.1. Ranking Jumlah Dokumen di SCImago berdasarkan bidang keilmuan di Asia tahun 1996 - 2016

Sumber : SCImago data, 2016

Oleh sebab itu, studi Islam Indonesia serta integrasi ilmu keagamaan dan umum melalui riset menjadi perlu diperkuat dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya riset (personel riset, anggaran dan fasilitas riset) dan publikasi riset. Pada akhirnya,

seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat dunia terhadap studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dapat berjalan searah.

**B. Posisi ARKAN 2018 – 2028 Dalam Sistem Perencanaan Nasional**

ARKAN 2018 – 2028 disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset pembangunan bidang agama secara nasional, sekaligus melengkapi delapan prioritas riset nasional pada ARN Tahun 2016-2019. Terutama prioritas riset nasional yang ke-8 yaitu fokus riset sosial humaniora. Pada ARN tersebut belum tercantum fokus bidang riset keagamaan. Oleh karena itu, ARKAN 2018-2028 menjadi sentral bagi perencanaan pengembangan keagamaan di lingkungan institusi, lembaga, dan pemerintahan.

Pada saat yang sama, dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keagamaan secara nasional. Penyusunan ARKAN 2018-2028 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan bidang keagamaan. Perumusan ARKAN 2018 - 2028 juga memperhatikan ketentuan tentang sistem nasional penelitian, inovasi dan pengembangan IPTEK. ARKAN 2018-2028 diposisikan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan riset bidang keagamaan.

Sebagai dokumen pengintegrasian dalam perencanaan riset keagamaan, ARKAN 2018 - 2028 mempertimbangkan peraturan Menteri Agama RI tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perumusan ARKAN 2018 - 2028 menyertakan peraturan Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019. ARKAN 2018 - 2028 disiapkan dalam rangka menuju sasaran nasional, yaitu kualitas, relevansi dan daya saing global.

**C. Posisi Arkan 2018 – 2028 di Lingkungan Kementerian Agama RI**

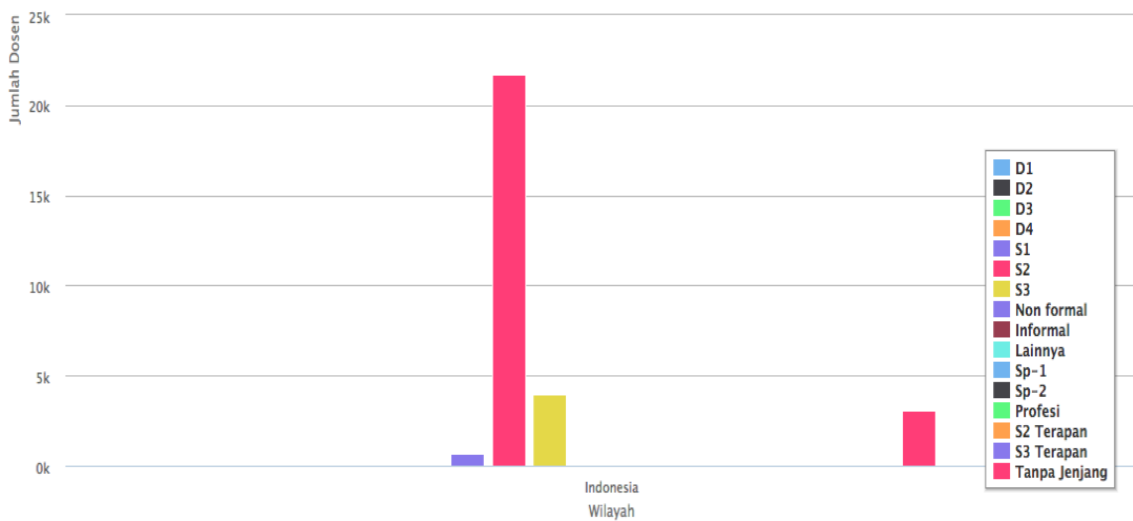
Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu manfaat ARKAN 2018 - 2028 adalah sebagai panduan terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan, maka keberadaan ARKAN 2018 – 2028 di lingkungan Kementerian Agama RI dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian selama 10 tahun ke depan.

Tema-tema penelitian keagamaan yang tertuang di dalam ARKAN 2018 – 2028, hendaknya menjadi *concern* dan acuan bersama di kalangan pelaksana penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam baik penelitian yang bersumber dari APBN-BOPTN maupun penelitian yang bersumber dari APBN-BLU.

**BAB III**  
**TEMA RISET ARKAN 2018 - 2028**

**A. Analisis Potensi**

Berdasarkan data yang terdapat di website pangkalan data pendidikan tinggi ([forlap.ristekdikti.go.id](http://forlap.ristekdikti.go.id)), PTKI memiliki kekuatan akademik berupa sumberdaya peneliti 21.400 dosen dengan pendidikan S2, dan 3.816 dengan pendidikan S3, serta masih ada sekitar 460 dosen PTKI yang berpendidikan sarjana (S1), sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1.



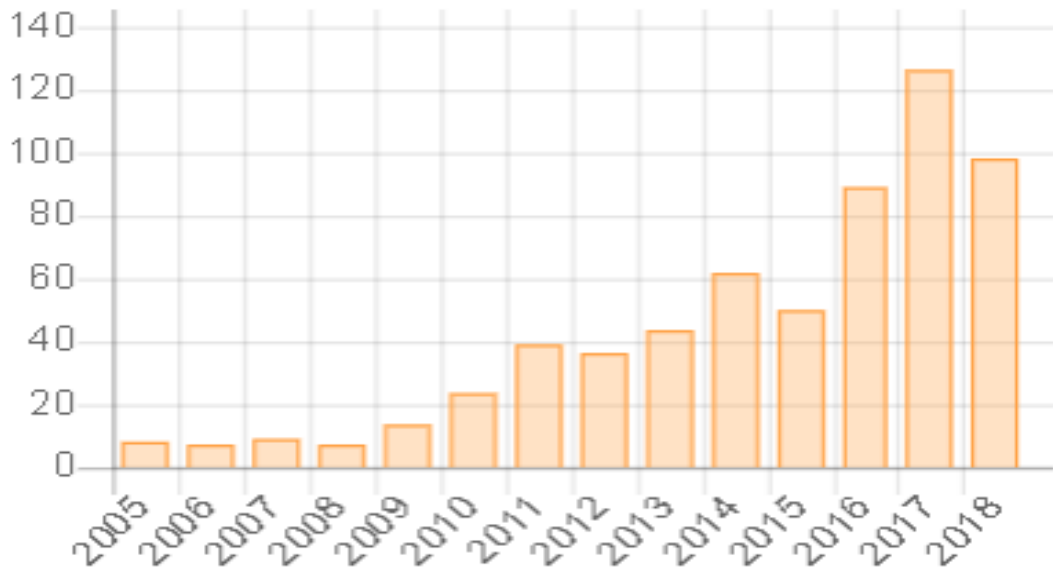
Grafik 3.1. Jumlah Dosen di Lingkungan PTKI

Sumber : <https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/homegraphjenjang>

Selain itu, jika dilihat pada aspek publikasi hasil penelitian di lingkungan PTKI juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai sampel, perkembangan publikasi hasil penelitian dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang tertuang dalam web SINTA, Kemenristekdikti RI, diperoleh gambaran perkembangan publikasi ilmiah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.

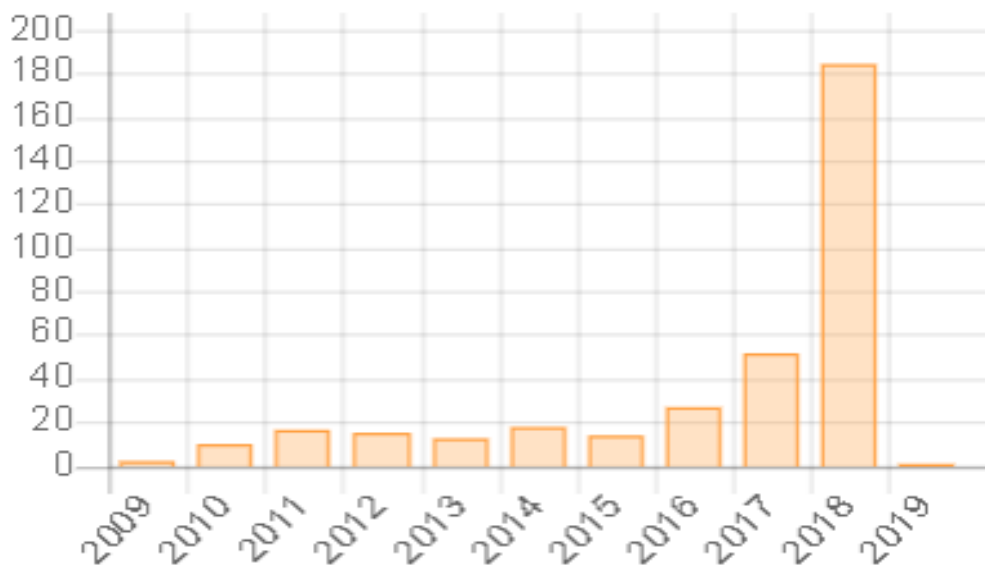
Begitu juga perkembangan publikasi hasil penelitian dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang secara dramatis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.

### Documents Per Year **Scopus**



Grafik 3.2. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus  
Sumber : [sinta2.ristekdikti.go.id](http://sinta2.ristekdikti.go.id)

### Documents Per Year **Scopus**



Grafik 3.3. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terindeks Scopus  
Sumber : [sinta2.ristekdikti.go.id](http://sinta2.ristekdikti.go.id)

Secara umum bisa dikatakan bahwa produktivitas para dosen di PTKI meningkat, baik produksi karya ilmiah lewat jurnal dan juga buku-buku. Dalam catatan sitasi di Google Scholar juga menunjukkan trend serupa. Selain itu, PTKI juga memiliki 4 Jurnal Ilmiah yang terakreditasi A (SINTA 1), yakni Jurnal Al-Jamiah, Studia Islamika, Indonesian Islam, dan IJIMS. Ditambah 61 jurnal dengan predikat akreditasi B (SINTA 2). Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh PTKI ini, Kementerian Agama RI akan terus menjaga kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan afirmasi dana peneliti, penguatan tema penelitian unggulan, pembinaan SDM peneliti, pengembangan karir peneliti dan peningkatan program *linkage* universitas dan industri sebagai bagian dari peningkatan dampak dan daya guna hasil penelitian dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Selain berdasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki PTKI ini, peningkatan kuantitas dan kualitas riset keagamaan juga memperhatikan beberapa langkah strategis berikut; (1) fokus riset kemandirian ilmu pengetahuan dan (2) intervensi kebijakan.

#### 1. Fokus Riset Kemandirian Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, namun kemajuan tersebut perlu diimbangi dengan adanya watak intelektual. Watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya yaitu taat pada rasio. Ciri-ciri watak intelektual antara lain, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan.

Ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang enlightened hanya bila masyarakat itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan yang taat pada rasio. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan adanya watak intelektual, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan disalahgunakan. Orang-orang akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya untuk keuntungan pribadi semata, bukan untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya watak intelektual dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat yang modern, maju, serta makmur akan dapat tercapai. Oleh sebab itu tema-tema penelitian ARKAN 2018 - 2028 akan memprioritaskan riset untuk Kemandirian Ilmu Pengetahuan.

#### 2. Intervensi Kebijakan

Daya inovasi berpengaruh pada daya saing ekonomi suatu bangsa yang akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil membangun perekonomian nasional yang kuat berbasis teknologi. Oleh sebab

itu, pengembangan dan penerapan inovasi IPTEK ini memerlukan intervensi pemerintah dalam aspek kebijakan.

Ketika daya saing rendah justru intervensi pemerintah harus diperkuat. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui kebijakan akan memprioritaskan kebijakan fiskal dan anggaran riset yang memadai. Anggaran yang dikeluarkan akan diprioritaskan untuk pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil penelitian keagamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, kontribusi produk berteknologi tinggi pada ekspor manufaktur dari Indonesia masih berkisar 31,3 persen. Tentu saja persentase ini masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara di dunia, terutama beberapa negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah mencapai 76,2 persen dan Thailand mencapai 60,3 persen. Dalam konteks ini, salah satu strategi untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia, akan dioptimalkan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang mengaitkan secara dinamis dan terintegrasi semua elemen perekonomian nasional. SIN dapat dibangun melalui kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup kebijakan IPTEK tapi juga industri, ekonomi fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan pendidikan.

#### **B. Tema Dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028**

ARKAN 2018 – 2028 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementrian Agama RI).

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan ARKAN 2018 - 2028 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi ARKAN 2018 – 2028, yaitu:

1. Studi Islam
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.1.



**Tabel 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028**

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
1	STUDI ISLAM	<b>1.1. Teks Suci dalam Agama-agama</b>	<p>Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi <i>turats</i>. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Quran and Hadits</i>)</li><li>2. Dialog Antar Teks dan Studi Agama-Agama</li><li>3. Sastra dan Teks Suci Dalam Sejarah</li><li>4. Penterjemahan dan Tafsir (Hermeneutika)</li></ol>
		<b>1.2. Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (<i>living law</i>) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syariah Dalam Produk Legislasi Nasional</li> <li>2. Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</li> <li>3. Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah</li> <li>4. <i>Living Law</i>: hukum adat dan syariah</li> <li>5. Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas.</li> <li>6. Fatwa Hukum dan Produk Syariah</li> <li>7. Humanitarianisme Islam</li> </ol>
		<p><b>1.3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren</b></p>	<p>Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren.</p> <p>Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tokoh Keulamaan Pesantren</li> <li>2. Transformasi Keilmuan</li> <li>3. Karya dan Inovasi Pesantren</li> <li>4. Pesantren dan Tantangan Globalisasi</li> <li>5. Pesantren dan Moderasi</li> <li>6. Pesantren dan Peran Masyarakat</li> </ol>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			7. Bahtsul Masail di Pesantren 8. Santri dan Civilization 9. Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (surau, dayah, langgar)
		<b>1.4. Pengembangan Pendidikan</b>	<p>Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi <i>lesson learnt</i> antar institusi dan peneliti. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pendidikan</li> <li>2. Manajemen pendidikan</li> <li>3. Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Inovasi pendidikan</li> <li>5. Pengembangan kemitraan pendidikan</li> <li>6. Kebijakan pendidikan</li> </ol>
<b>2</b>	<b>PLURALISME DAN KERAGAMAN</b>	<b>2.1. Negara, Agama, dan Masyarakat</b>	<p>Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan</li> <li>2. Demokrasi, sekularisasi, patriotisme</li> <li>3. Pemilihan umum dalam aspek keragaman</li> <li>4. Desentralisasi pemerintahan</li> <li>5. Kebijakan negara tentang keragaman</li> <li>6. Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan</li> <li>7. Relasi agama dan negara dalam</li> <li>8. Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan</li> <li>9. Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan</li> <li>10. Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan</li> </ol>
		<p><b>2.2. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan</b></p>	<p>Topik ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang semakin marak. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model dirasa penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Keragaman (Budaya Lokal)</li> <li>2. Kebijakan Negara Tentang Keragaman</li> <li>3. Pendidikan dan Keragaman</li> <li>4. Dialog Antar Iman, Agama, dan Lembaga</li> <li>5. Tokoh dan Individu</li> <li>6. Konteks Global dan Lokal</li> <li>7. Konflik dan Resolusi</li> <li>8. Minoritas-Mayoritas</li> <li>9. Radikalisme, Fundamentalisme, Liberalisme, Moderasi (<i>Tawasuth</i>)</li> </ol>
3	<b>INTEGRASI KEILMUAN</b>	<b>3.1. Pendidikan Transformatif</b>	<p>Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. <i>Character building</i> dan <i>life skill</i> dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Character Building</i></li> <li>2. <i>Life Skill</i></li> <li>3. Pendidikan Multikultural</li> <li>4. Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas</li> <li>5. Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing)</li> <li>6. Psikologi dan Perkembangan Pendidikan Anak</li> <li>7. Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan</li> <li>8. Pengembangan Pendidikan Kontemporer</li> </ol>
		<p><b>3.2. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip</b></p>	<p>Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan dan Preservasi Naskah Kuno</li> </ol>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penterjemahan/Alih Bahasa dan Pentashihan</li> <li>3. Benda-Benda Arkeologi</li> <li>4. Periodisasi dan Kronologi</li> <li>5. Karya-Karya Ulama Nusantara</li> </ol>
		<p><b>3.3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat</b></p>	<p>Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku Terasing</li> <li>2. Desa Tertinggal</li> <li>3. Disabilitas</li> <li>4. Anak Jalanan</li> <li>5. Manula</li> <li>6. Panti Asuhan</li> <li>7. Narkoba</li> </ol>
		<p><b>3.4. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan</b></p>	<p>Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan</p>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Integrasi Kedokteran dan Keislaman</li><li>2. Teknologi Kedokteran dan Kesehatan</li><li>3. Produk Halal (Obat dan Vaksin)</li><li>4. Asuransi Kesehatan Syariah</li><li>5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Syariah</li><li>6. Inovasi Kedokteran</li></ol>
		<b>3.5. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi</b>	<p>Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan</p>



No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Lingkungan Berbasis Syariah</li> <li>2. Rekayasa Keteknikan Dasar, Terapan, dan Teknologi Tinggi Berbasis Kemanfaatan Bagi Umat</li> <li>3. Studi Sumber Energi Baru dan Terbarukan</li> <li>4. Astronomi/Ilmu Falak</li> <li>5. Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ol>
4	<b>KEMAJUAN GLOBAL</b>	<b>4.1. Studi Kawasan dan Globalisasi</b>	<p>Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Komparatif Kawasan (Negara - Negara di Asia, Eropa,</li> </ol>

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>Amerika, Afrika dan Australia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Migrasi dan Globalisasi.</li> <li>3. <i>Human Security</i> di Beberapa Kawasan Konflik.</li> <li>4. Pertahanan dan Keamanan Kawasan.</li> <li>5. Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global.</li> <li>6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW).</li> <li>7. Pengungsi (<i>Refugees</i>)</li> </ol>
		<p><b>4.2. Isu Jender dan Keadilan</b></p>	<p>Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme</li> <li>2. Kesetaraan dan Keadilan Jender</li> <li>3. Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender</li> <li>4. Kesejahteraan Anak</li> </ol>
		<p><b>4.3. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah</b></p>	<p>Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti</p>

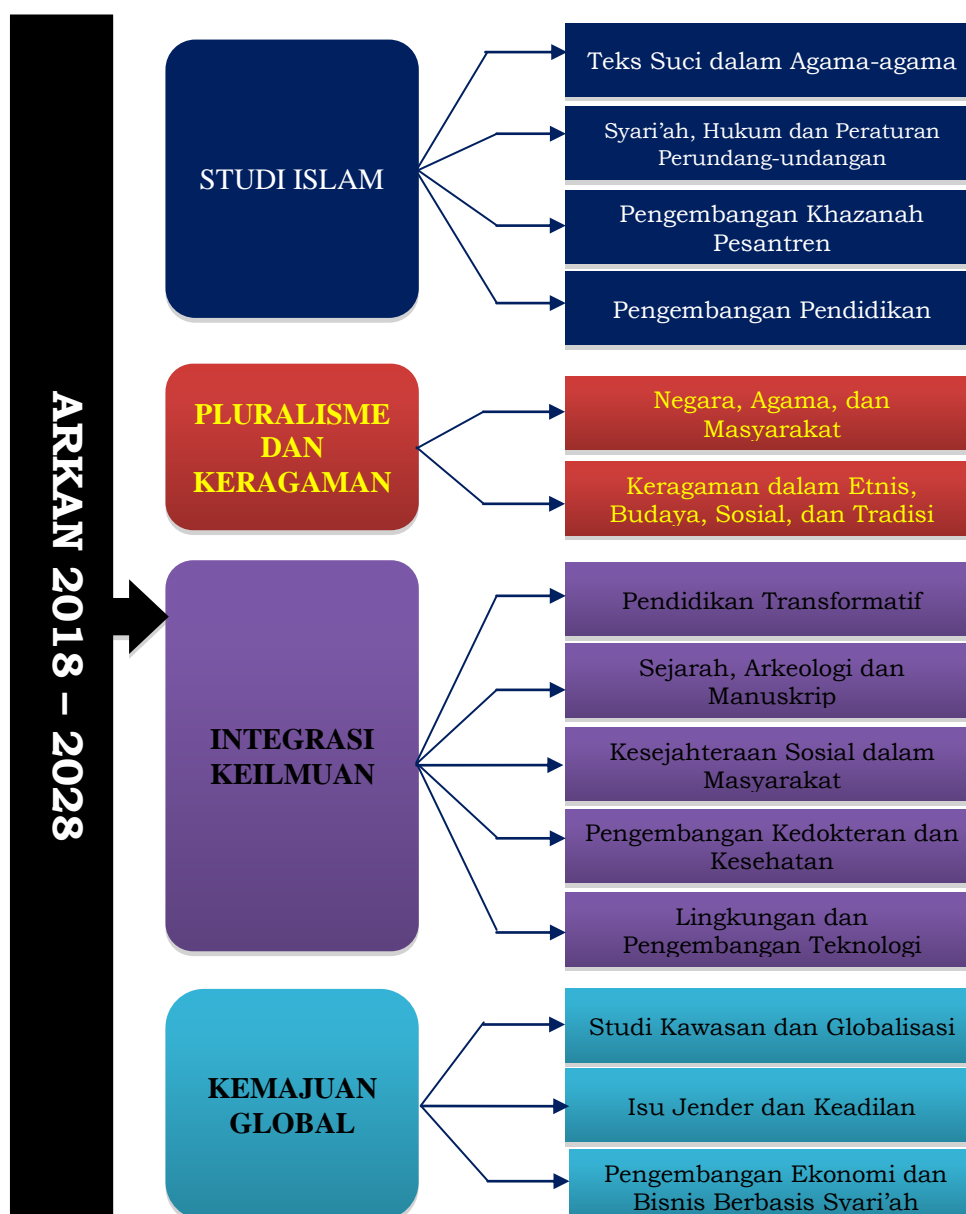
No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			<p>perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekonomi Global dari Aspek Syariah</li><li>2. Aspek Syariah dalam Perbankan Global</li><li>3. Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel)</li><li>4. Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro</li></ol>

### C. Roadmap ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pemetaan topik riset dan fokus riset ARKAN 2018 - 2028 yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimplifikasi bahwa ARKAN 2018 – 2028 memiliki 4 (empat) tema utama, dengan 14 sub-tema, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028**

Berdasarkan pada 4 tema dan 14 sub-tema tersebut, maka pemetaan (*roadmap*) penelitian keagamaan 2018 – 2028, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahapan besar, yakni *longterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun 5 (lima) tahunan, dan *shortterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Berikut pemetaan penelitian dalam kurun 5 tahun (*longterm roadmap*) dan pemetaan dalam kurun waktu per tahun (*shortterm roadmap*).



### 1. Pemetaan Penelitian 5 Tahunan (*Longterm roadmap*)

Pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*), penelitian keagamaan nasional diarahkan pada 2 target utama, yakni penguatan penelitian dasar (*basic research*) pada 5 tahun pertama dan penguatan penelitian terapan (*applied research*) pada 5 tahun kedua. Dengan kata lain, agenda riset keagamaan pada 5 tahun pertama diarahkan pada penguatan pencarian dan penemuan teori baru berkenaan dengan studi Islam (*Islamic studies*), pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan dan kemajuan global, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi dan perolehan hak cipta (*copyright*). Sedangkan pada 5 tahun berikutnya diarahkan pada penerapan teori atau aplikasi atas temuan-temuan penelitian di masyarakat dan industri, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi, perolehan hak cipta (*copyright*), perolehan paten dan hilirisasi hasil penelitian di dunia industri dan masyarakat luas.



**Gambar 3.2. Pemetaan (*Longterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028**

## 2. Pemetaan Tahunan (*Shortterm roadmap*)

Berdasarkan pada pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*) di atas, maka pelaksanaan penelitian keagamaan per tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.3. Pemetaan (*Shortterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028**



## BAB IV IMPLEMENTASI ARKAN 2018 – 2028

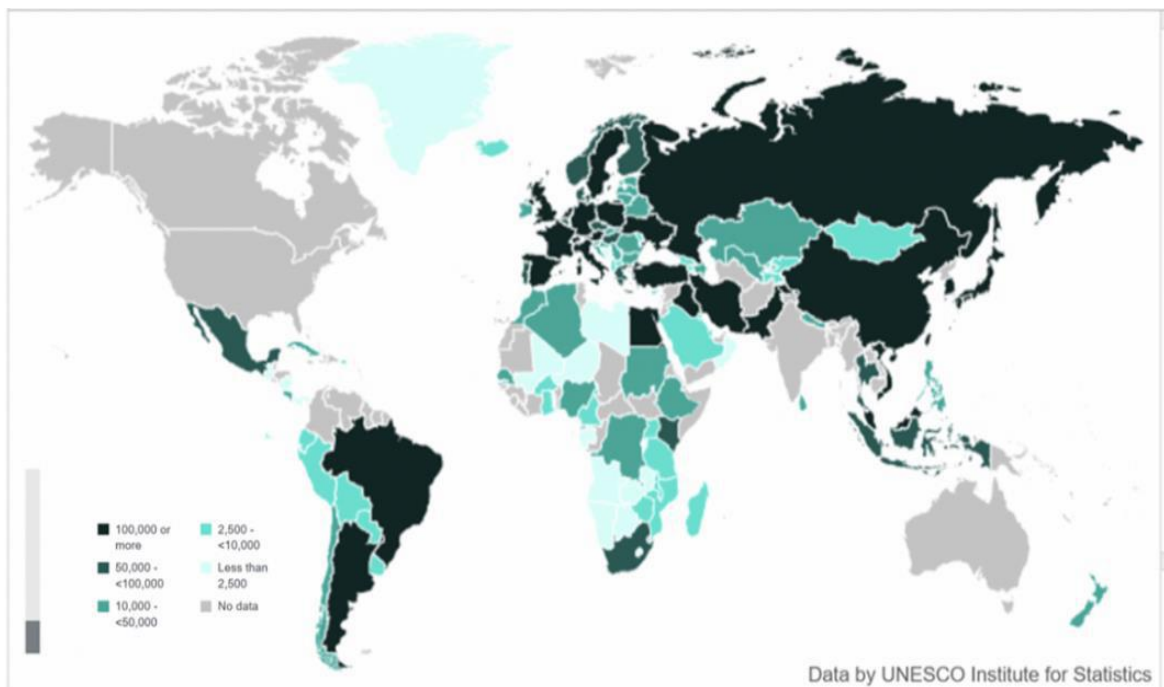
### A. Sumber Daya Riset

#### 1. Kapasitas Peneliti Indonesia

Kekuatan riset, pengetahuan, teknologi sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kapasitas penelitian. Adanya relasi erat antara kemampuan peneliti dan publikasi yang dihasilkan dalam inovasi riset, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks ini, ARKAN 2018 - 2028 bertujuan meningkatkan kapasitas para peneliti di terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian melalui kegiatan riset yang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk tujuan itu perlu melihat peta kekuatan Indonesia dalam kancah global.

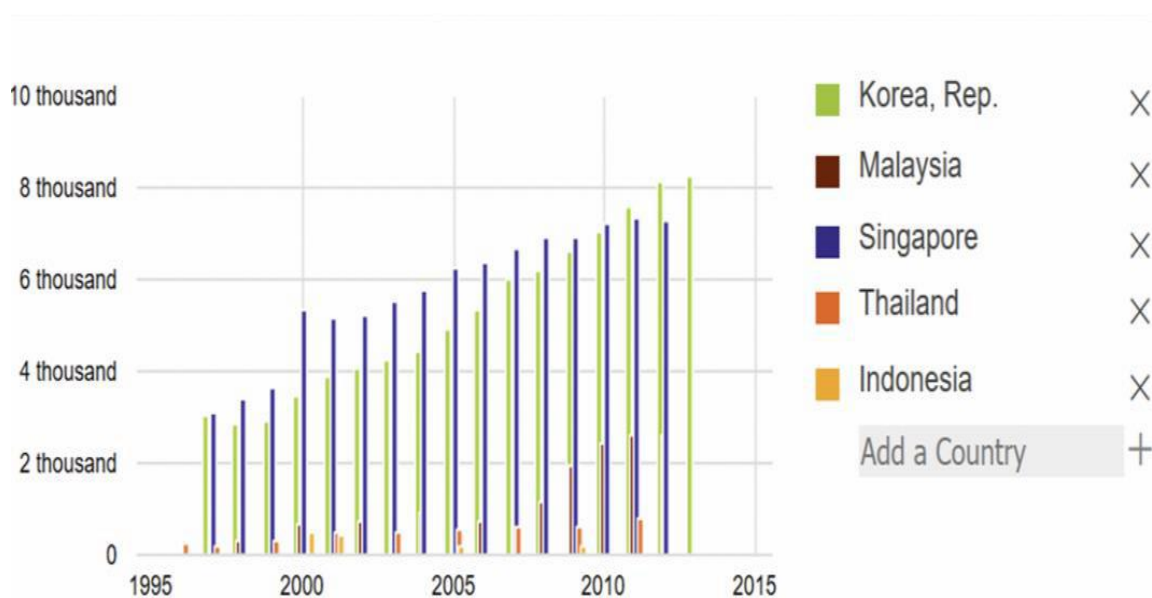
Sebagaimana dijelaskan Gambar 4.1. di bawah ini menunjukkan bahwa negara-negara maju yang kuat ekonomi dan IPTEK-nya didukung oleh banyaknya jumlah peneliti. Untuk kasus di Asia, majunya ekonomi dan IPTEK Korea Selatan dan Jepang didukung oleh melimpahnya peneliti yang berkualitas. Sebagaimana sudah diketahui bahwa salah satu faktor utama kemajuan Korea Selatan saat ini adalah kekuatan riset, pengetahuan, dan teknologinya. Semenjak tahun 1960-an melalui berbagai kebijakannya, pemerintah Korea Selatan mendorong kemajuan IPTEK dalam rangka mendukung daya saing industrinya. Guna meningkatkan kemampuan IPTEKnya, pemerintah Korea Selatan juga mendorong keberadaan SDM peneliti.

Gambar 4.1. Kondisi Personil Litbang di Dunia



Sumber: UIS (2015)

Grafik 4.1. di bawah ini menunjukkan trend peningkatan jumlah peneliti yang signifikan di Korea Selatan. Saat ini jumlah peneliti di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu atau setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura, jumlah peneliti per sejuta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 7 ribu. Sementara itu, Malaysia yang memiliki 2.590 peneliti per sejuta penduduk, dan Thailand dengan 1.765 peneliti per sejuta penduduk, dan Indonesia masih berkisar 1.072 peneliti per sejuta penduduk.



Grafik 4.1. Jumlah Peneliti Per Sejuta Penduduk (head count)  
Sumber: UIS (2015)












Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peneliti Indonesia masih jauh berada di bawah negara- negara di kawasan Asia. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan kondisi ekonomi Indonesia melalui riset harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas peneliti. Penambahan jumlah peneliti di Indonesia seharusnya menjadi isu krusial saat ini. ARKAN 2018 - 2028 dalam hal ini berusaha mencapai peningkatan secara signifikan dan seimbang antara jumlah dan kapasitas peneliti.

## 2. Publikasi Hasil Riset

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk negara yang minim dalam sumberdaya riset dan publikasi riset jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Gambar 4.2 menunjukkan publikasi internasional Indonesia dari hasil riset tingkat Asia maupun Asia Tenggara berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.



Gambar 4.2. Publikasi Internasional Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara ASEAN

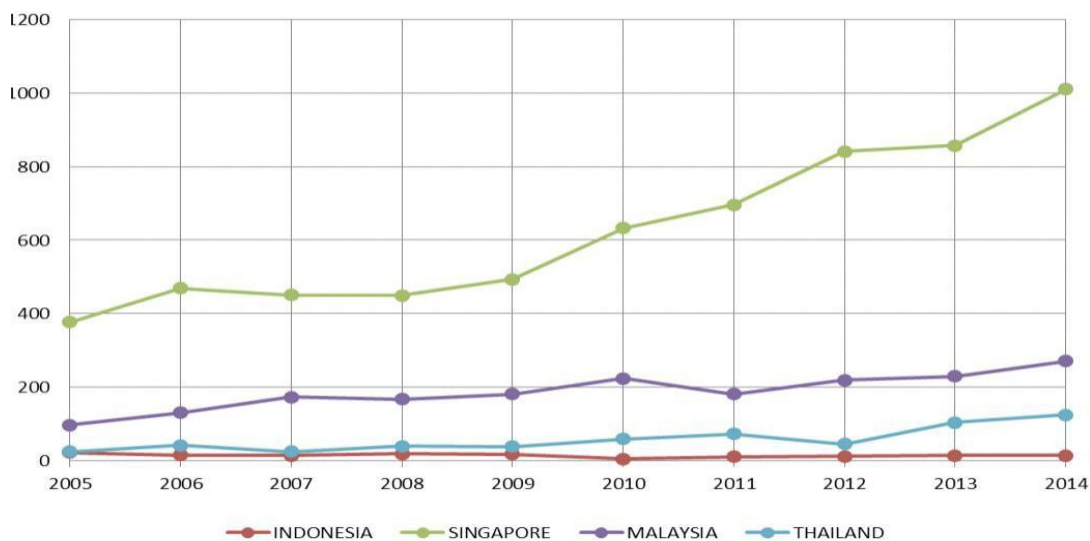
	Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H Index
1	 China	5133924	5052579	39244368	21831514	7.64	712
2	 Japan	2539441	2437565	39049963	10407744	15.38	920
3	 India	1472192	1379217	12637866	4329674	8.58	521
4	 South Korea	1004042	973360	12299582	2501499	12.25	576
5	 Taiwan	614487	593852	7746794	1530538	12.61	437
6	 Singapore	265452	246176	4786877	557083	18.03	492
7	 Hong Kong	263602	245629	5024294	597961	19.06	479
8	 Malaysia	248457	239537	1615633	421749	6.50	249
9	 Thailand	156829	148862	1740576	273578	11.10	289
10	 Pakistan	127817	121836	943372	243217	7.38	217
11	 Indonesia	75220	72146	466289	71052	6.20	196

Sumber: SCImago, 2018

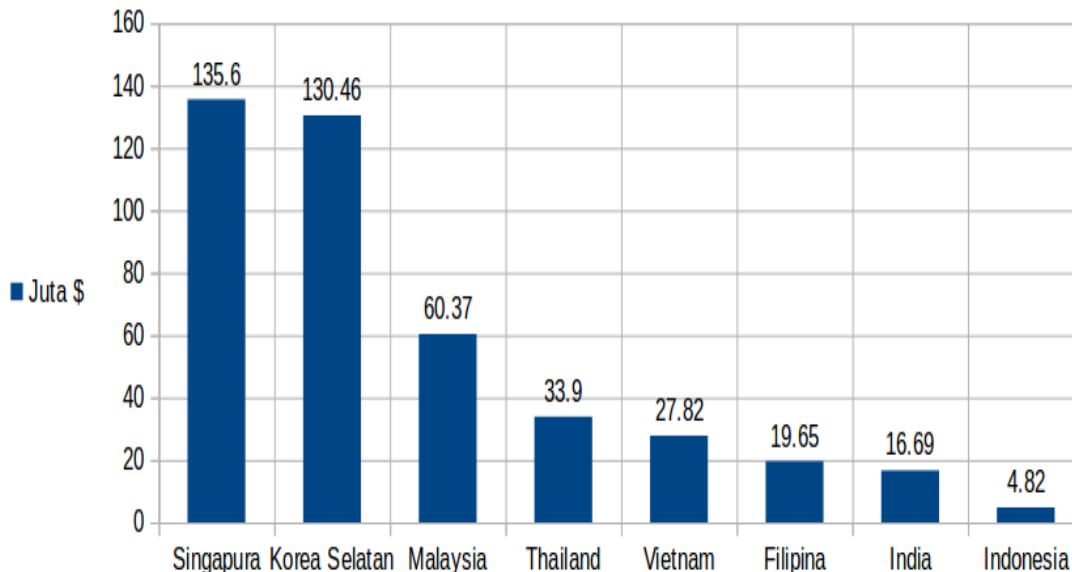
Tabel 4.1. Peringkat 10 Publikasi Internasional Indonesia Berdasarkan Bidang Keilmuan 1996-2014

Rank	Country	Documents	Citable Documents	Citations	Self-Citations	Citations Per Document	H-Index
1	China	4595249	4525851	32913858	18210007	7.16	655
2	Japan	2367977	2277777	35480575	9503478	14.98	871
3	India	1302605	1223521	10839171	3694872	8.32	478
4	South Korea	914572	887739	10741924	2220618	11.75	536
5	Taiwan	575296	556749	6885565	1402557	11.97	406
6	Singapore	241361	224763	4097146	486934	16.98	454
7	Hong Kong	241145	225890	4385700	529709	18.19	447
8	Malaysia	214883	207498	1299378	341788	6.05	224
9	Thailand	139682	132845	1510067	238251	10.81	269
10	Pakistan	109760	104759	767057	198885	6.99	197
11	Indonesia	54146	51665	380569	50906	7.03	175

Begitu pula perbandingan jumlah paten Indonesia di tingkat Asia maupun Asia Tenggara masih kalah dengan negara-negara jiran, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

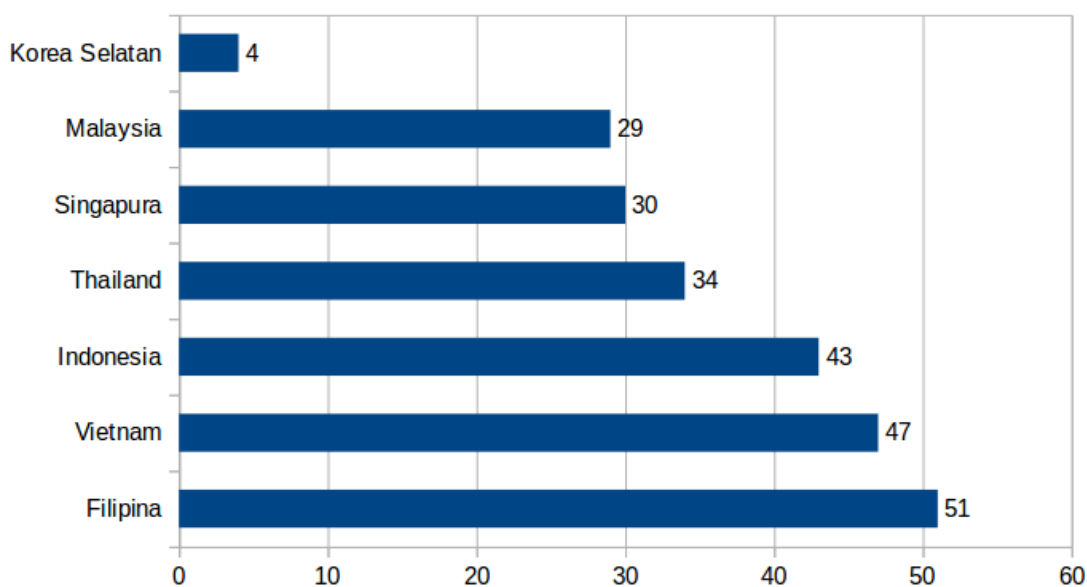


**Grafik 4.2.** Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di USPTO 2005-2014  
Sumber: USPTO, 2015



**Grafik 4.3.** Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di WIPO 2005-2014  
Sumber : WIPO, 2015

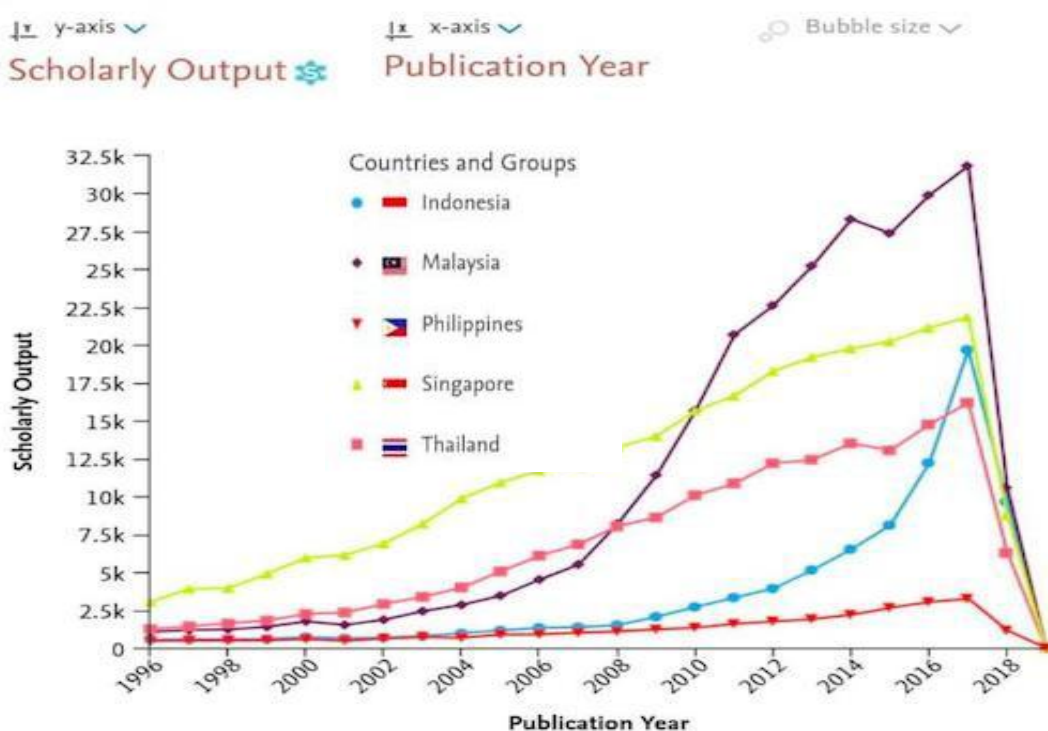
Berdasarkan laporan WIPO tahun 2015, sebagaimana terlihat pada grafik 4.3. diperoleh informasi bahwa Indonesia menempati peringkat 43 paten dunia dan 4 di ASEAN. Sedangkan Korea Selatan menduduki peringkat 4 jumlah paten di dunia. Data ini dapat dilihat pada grafik 4.3. dan grafik 4.4. di bawah ini.



Grafik 4.4. Peringkat paten terdaftar di beberapa negara Asia, 2014

Sumber: WIPO, 2015

Namun pada kurun 5 tahun terakhir, berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemeristekdikti, Kementerian Agama RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terjadi peningkatan yang serius dengan publikasi ilmiah Indonesia.

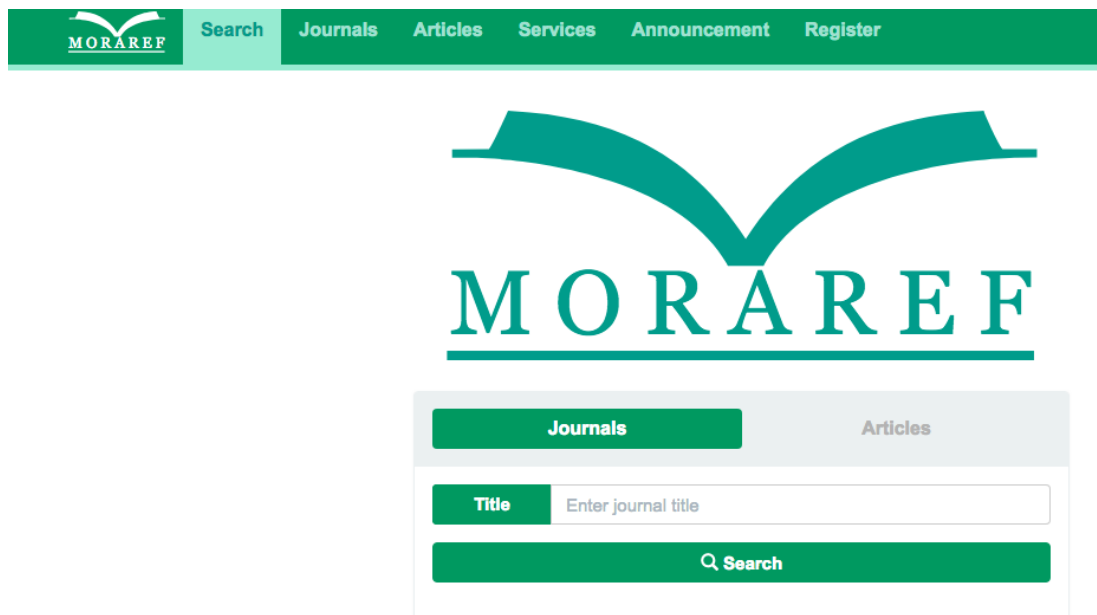


Grafik 4.5. Publikasi Per-Tahun

Sumber: Scival

Di Kementerian Agama RI sendiri juga membina jurnal-jurnal di lingkungan PTKI dengan mendirikan MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) yang menampung banyak jurnal untuk pembinaan dan standar mutu. Saat ini telah ada 950 jurnal yang terus meningkatkan level akreditasi, sitasi, dan index dibawah bimbingan MORAREF.

Gambar 4.3. MORAREF



Dengan singkat kata, baik secara nasional maupun level PTKI, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap publikasi ilmiah dan kualitas jurnal.

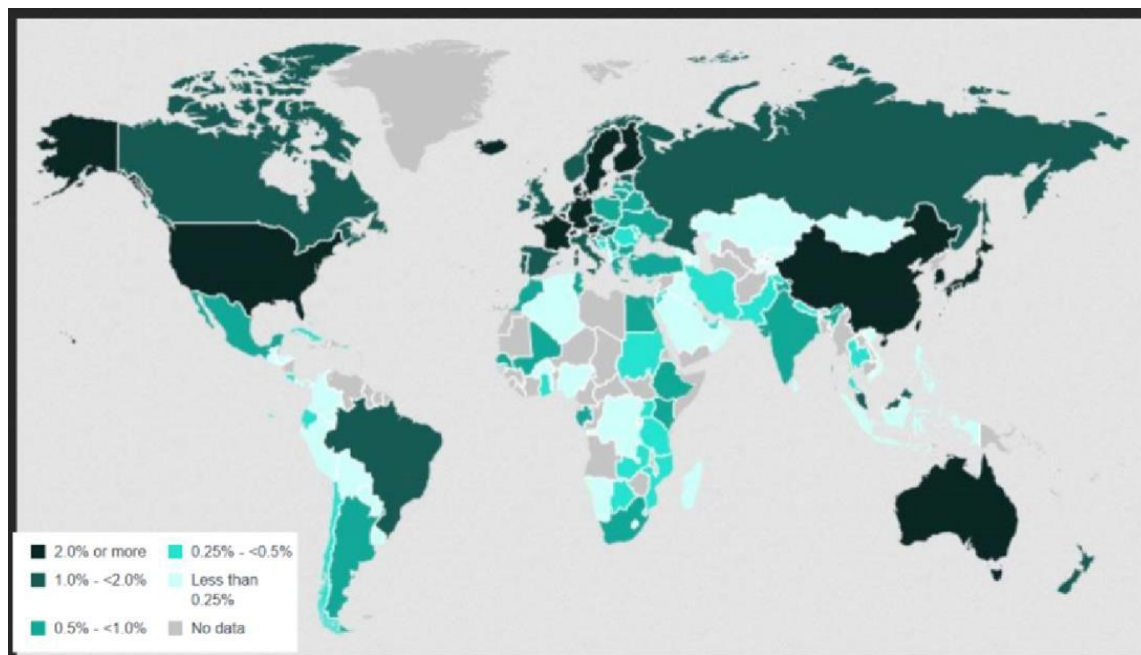
### 3. Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja IPTEK suatu negara. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) saat ini, banyak negara yang mempunyai komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam kegiatan riset. Ini didorong oleh keyakinan bahwa riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang.

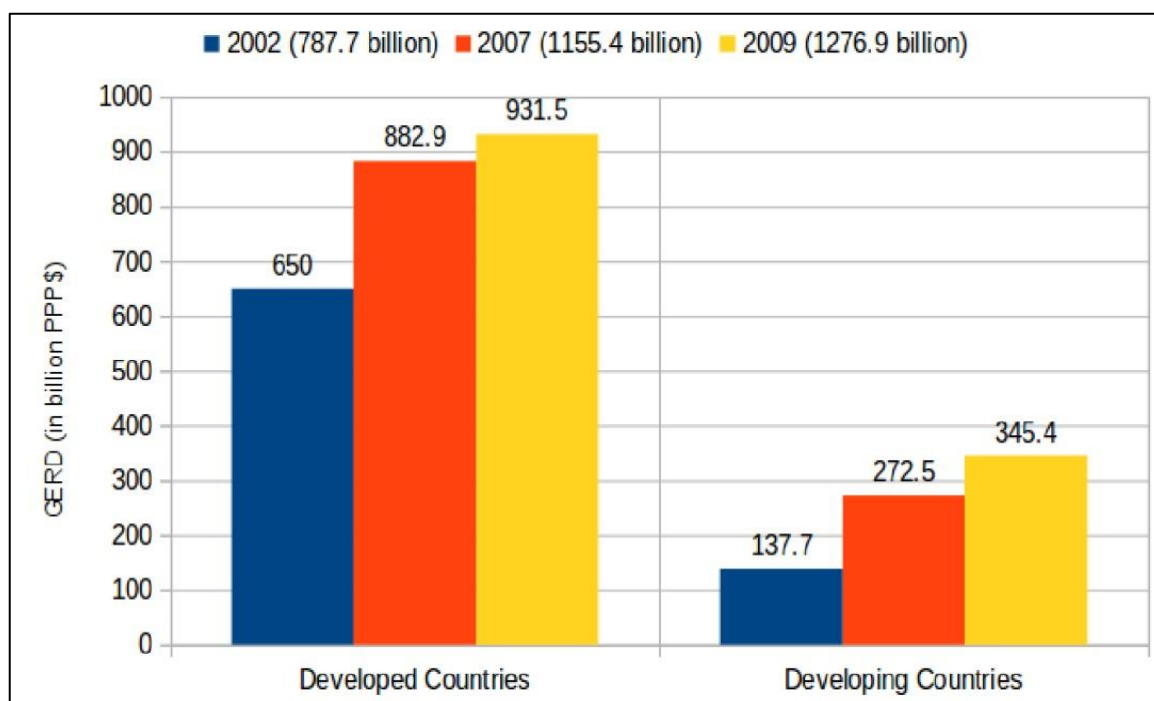
Komitmen ini dapat dilihat dari proporsi belanja litbang bruto (GERD: Gross Expenditure on R&D) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Gambar 4.2. menunjukkan bahwa negara-negara dengan GERD per PDB tinggi adalah negara yang perekonomiannya maju, seperti Israel (4.2%), Korea Selatan (4.1%), Jepang (3.5%), Finlandia (3.3%), Swedia (3.3%), Denmark (3.1%) dan Swiss (3.0%). Negara-negara maju di benua Asia memiliki rata-rata GERD per PDB sebesar 1.6% dan tertinggi adalah Korea Selatan dan Jepang. Diikuti kemudian dengan Singapura (2.0%), Cina (2.0%), Malaysia (1.1%) dan Thailand (0,39%). Sementara itu, saat ini GERD per PDB Indonesia belum mencapai

angka 1%. Komposisi belanja litbang Indonesia juga masih didominasi oleh sektor pemerintah (Grafik 4.5.). Sementara itu, negara-negara lain yang maju IPTEK dan ekonominya mayoritas investasi litbang dilakukan oleh sektor bisnis (Grafik 4.6. dan grafik 4.7.).

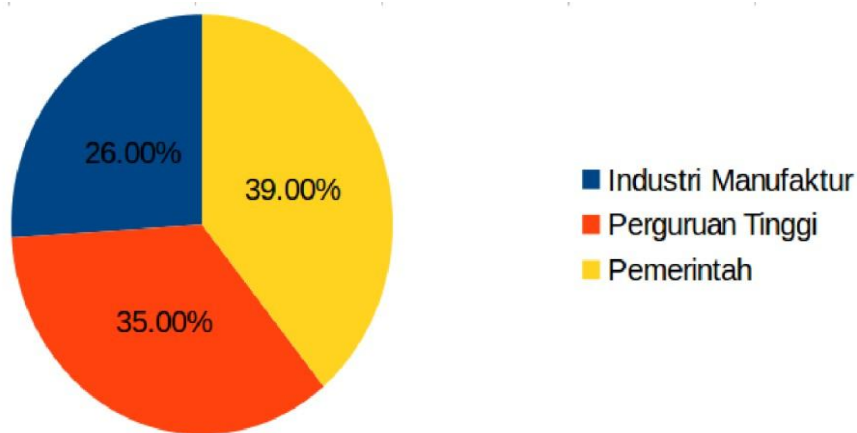
Gambar 4.4: Kondisi Belanja Litbang (GERD terhadap PDB) di Dunia



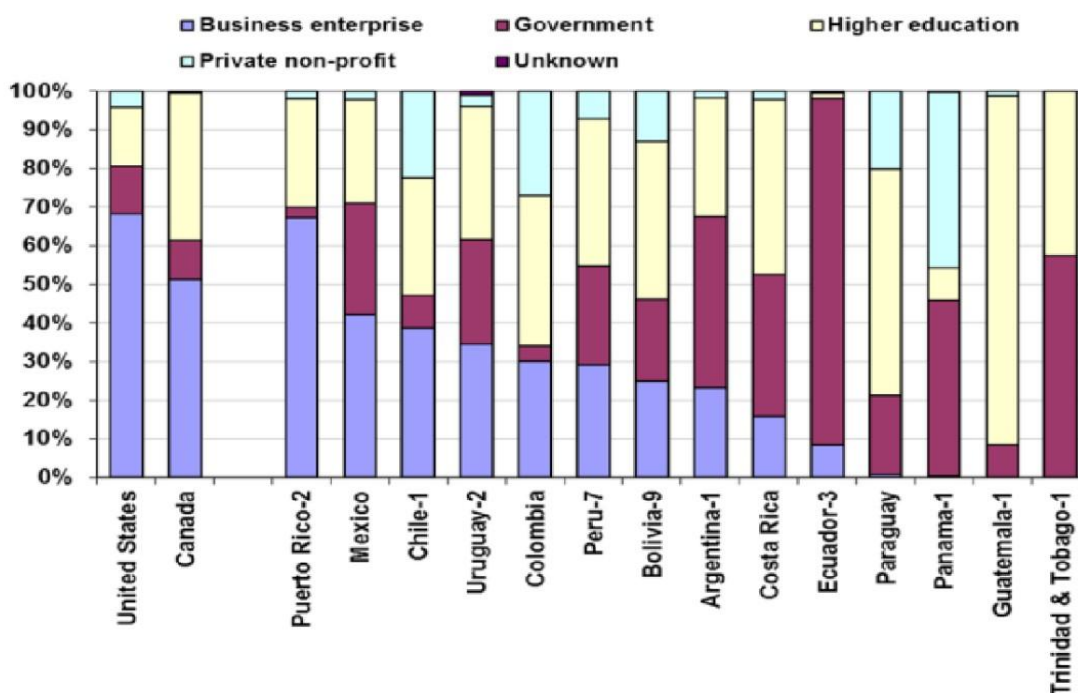
Sumber: UIS (2015)



Grafik 4.6. Perbandingan GERD Negara Maju dan Berkembang  
Sumber: UIS (2013)



Grafik 4.7. Komposisi Belanja Litbang Nasional Menurut Sektor  
Sumber: PAPPITTEK-

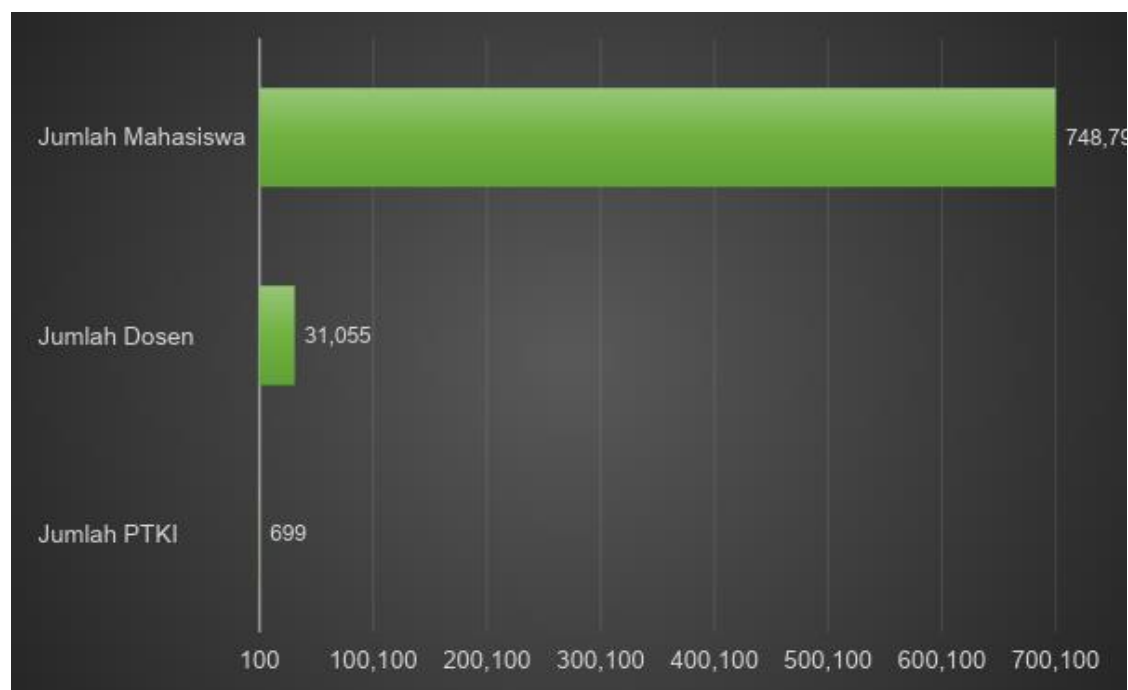


Grafik 4.8. Komposisi Belanja Litbang Menurut Sektor di Negara-Negara Amerika

Sumber: Dokumen RIRN 2017 - 2045

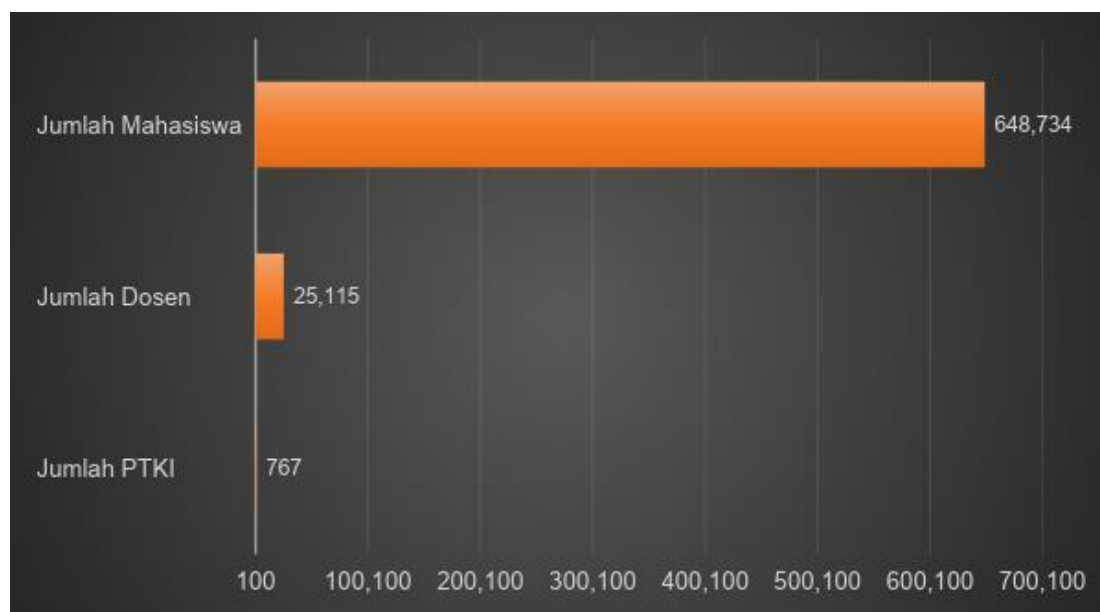
**B. Kelompok Sasaran Makro Dan Mikro ARKAN 2018 - 2028**

Implementasi ARKAN 2018 – 2028 ditujukan pada berbagai komunitas makro dan mikro penelitian yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI. Pada kelompok sasaran makro, ARKAN 2018 – 2028 dapat dilaksanakan oleh seluruh PTKI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Berdasarkan data yang terdapat di Education Management Information System (EMIS), jumlah kelompok makro yang dapat dijadikan sebagai sasaran ARKAN 2018 – 2028 seluruh Indonesia adalah; (1) 699 PTKI, (2) 31.055 dosen dan (3) 746.793 mahasiswa. Selengkapnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.9. Kelompok Sasaran Makro versi Data EMIS  
Sumber: Data EMIS Tahun 2018

Jika merujuk pada Data pada Forlapdikti Tahun 2018, data EMIS terkait dengan jumlah PTKI, dosen dan mahasiswa ini agak berbeda sedikit jumlahnya. Berdasarkan data pada *website* forlapdikti, terdapat: (1) PTKI sebanyak 767 institusi, dengan rincian 17 universitas, 105 institut, 640 sekolah tinggi, dan 5 akademi; (2) dosen sebanyak 25.115, dengan rincian 16.725 laki-laki dan 8.390 perempuan, dan (3) mahasiswa sebanyak 648.735 mahasiswa, dengan rincian, 256.890 laki-laki dan 391.844 perempuan. Data kelompok sasaran makro versi Forlapdikti ini, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.10 Kelompok Sasaran Makro Versi Data Forlapdikti  
 Sumber : ForlapDikti, 2018

Secara umum kelompok makro riset keagamaan ini memerlukan percepatan peningkatan kuantitas maupun kualitas yang dilakukan secara konsisten, mengingat anggaran yang tersedia cukup memadai di APBN, yakni 20%. Alokasi anggaran ini cukup signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan. Hanya saja diperlukan decision maker agar alokasi anggaran itu terserap juga untuk pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora. Kenyataan bahwa realisasi belumlah sepenuhnya 20% mengingat penyerapan yang tidak optimal. Penyerapan anggaran bagi pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora perlu dilakukan secara maksimal.

Jumlah sasaran makro tersebut belum termasuk kelompok makro lain dari unsur Badan Litbang dan Diklat (Balitbang) dan Puslitbang Kementerian Agama RI yang ada sekarang ini, sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.2. Kelompok Sasaran Makro di Kementerian Agama RI Unit Kerja Pusat dan Daerah

No.	Institusi				
	Unit Kerja	Pusat Penelitian	Lajnah Pentashihan	UPT	Unit Kerja
1	Pusat	5	1	-	-
2	Daerah	-	-	3	14
Jumlah		5	1	3	14

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2018



Selain kelompok sasaran makro di lingkungan Kementerian Agama, ARKAN 2018 – 2028 juga dapat menyasar kelompok mikro di luar Kementerian Agama yang memiliki concern yang sama dalam pengembangan riset keagamaan. Di antara beberapa kelompok sasaran mikro tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organizations (NGOs), yang jumlahnya belum tercatat secara pasti, seperti lembaga riset di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), PERTI, PERSIS, dan lain sebagainya sebagainya.

### C. Peluang Kemitraan

Peluang kemitraan yang dimaksud adalah kebijakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam implementasi berbagai riset keagamaan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ARKAN 2018 – 2028 dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak dan lintas departemen. Berdasarkan informasi dalam RIRN 2017 – 2045, telah ada kebijakan makro strategis pendukung kegiatan riset nasional yang diarahkan bagi peningkatan sinergi antarpelaku riset. Berikut kebijakan makro strategis pendukun kegiatan riset yang diadaptasi dari RIRN 2017 – 2045.

Tabel 4.3. Peluang Kemitraan Pendukung Kegiatan Riset ARKAN 2018 – 2028

Kebijakan	Penanggung Jawab
Komitmen alokasi APBN untuk memenuhi 25% kontribusi negara untuk riset (GBAORD/PDB)	Kemenkeu-KPPN/ Bappenas/Kemenristekdikti
Insentif pengurangan pajak dari alokasi anggaran riset swasta	Kemenkeu
Anggaran riset murni sebagai bagian dari dana CSR	Kemenkeu
Integrasi dan peningkatan jumlah anggaran riset ke DIPI	Kemenkeu, LPDP, DIPI
Insentif modal ventura	Kemenkeu, OJK, BEKraf
Insentif pendirian perusahaan ventura	Kemenperindag, Kemenkop UKM, Kemenkum HAM, BKPM
Evaluasi dan revitalisasi skema hibah riset pemerintah (riset murni, diseminasi, infrastruktur, penguatan kelembagaan)	Kemenristekdikti
Insentif pemakaian inovasi dalam negeri (TKDN), baik komponen fisik maupun Intelektual	Kemenperindag, Kementerian Agama RI, Kemenristekdikti
Insentif kolaborasi riset dengan mitra global	Kemenristekdikti, LPNK/DIPI, Balitbang Kementerian
Penetapan dan dukungan untuk pusat- pusat infrastruktur riset bersama di PT dan lembaga litbang sesuai kompetensinya	Kemenristekdikti

Kebijakan	Penanggung Jawab
Realisasi skema hibah infrastruktur riset untuk pusat infrastruktur riset bersama	Kemenristekdikti
Integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranahnya	BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, Balitbang
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui LPDP	Kemenkeu, Kemenristekdikti, LPDP
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui Program 5000 Doktor	Kementerian Agama, Balitbang Kementerian Agama dan PTKIN
Insentif studi pasca sarjana di dalam negeri bagi lulusan baru	Kemenristekdikti, LPDP
Insentif peneliti unggul eks diaspora dan WNA	Kemenristekdikti
Evaluasi untuk peningkatan insentif bagi fungsional terkait (dosen, peneliti, perekayasa, aneka pranata pendukung)	Kemenristekdikti, BATAN, BPPT, LIPI
Realisasi skema pasca-doktoral bagi kandidat peneliti berkualifikasi S3	Kemenristekdikti

Sumber: RIRN 2017 – 2045

## **BAB V**

### **MANAJEMEN PENELITIAN**

#### **A. Isu dan Langkah**

Menurut pengalaman dan data yang ada di Kementerian Agama RI dan mungkin juga Kementerian lain, terutama melihat perkembangan riset di PTKI dengan melihat penelitian tahunan, penelitian diadakan sesuai dengan RKKAL dan dana dikucurkan setiap tahunnya mengalami kesulitan untuk diukur keberhasilan dari segi publikasi dan dampak penelitian. Kontrol penelitian dan publikasi selama ini sulit dilaksanakan dari segi akademik dan publikasi. Penelitian dilakukan dengan sistem pelaporan keuangan dan diperiksa sesuai dengan standard ITJEND dan BPK dari segi keuangan. Namun, dalam hal ini pemeriksaan terkonsentrasi pada laporan keuangan dan berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah melaksanakan penelitian, para peneliti membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Pemeriksaan selalu dikaitkan dengan penggunaan dana, yang diatur dalam SOP dan standard biaya. Pemeriksaan dan standard semacam ini dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, secara akademik pengukuran keberhasilan penelitian dengan standar output dan outcome akademik dan publikasi belum begitu tersentuh. Output dan outcome yang dimaksud di sini, dalam jangka pendek dan panjang, berupa publikasi, baik dalam jurnal nasional, internasional ataupun dalam bentuk buku dengan publisher/penerbit yang bereputasi. Ini persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh Kementerian Agama RI baik di level pusat maupun level PTKI. Kontrol pelaksanaan penelitian dan publikasi belum maksimal.

Kontrol pada level peneliti/para penerima hibah, yaitu dosen PTKI, belum terlihat terlihat karena pihak pemberi hibah, yakni Kementerian Agama RI, selama ini berkonsentrasi pada kepastian dana, dari sisi RKKAL dan pelaporan keuangan. Pelaporan-pelaporan dana yang dijadikan acuan, karena menghadapi pemeriksaan yang lebih tinggi, seperti ITJEND dan BPK. Maka konsentrasi kendali mutu penelitian dan publikasi belum terjamin. Persoalan ini bisa ditelusuri lewat data yang belum pasti, berapa persen dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh para penerima hibah setiap tahunnya yang benar-benar menjadi produk publikasi di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Hasil dari publikasi memang ada. Namun, bagaimana proses itu diawasi dan dikontrol mutu penelitian belum ada mekanisme dan manajemen yang terpercaya.

Dalam lima tahun terakhir ini, publikasi PTKI sangat menggembirakan. Ini berkat program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bersinergi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan berbagai upaya meningkatkan jurnal ilmiah baik level nasional maupun internasional. Jumlah akreditasi dan

peningkatan mutu jurnal meningkat. Saat ini Kementerian Agama mempunyai paling tidak empat jurnal bereputasi dan terindex nasional, Scopus (Sinta 1): Al Jamiah, UIN Sunan Kalijaga; Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah; Journal of Indonesian Islam, UIN Sunan Ampel; IJIMS, IAIN Salatiga. Selain itu ada 61 jurnal terakreditasi B (Sinta 2). ini merupakan kabar yang menggembirkan.

Namun publikasi bisa dipacu tidak hanya terkait dengan manajemen dan tampilan jurnal melalui OJS (*Online Journal System*). Yang lebih penting lagi adalah bahan untuk jurnal itu sendiri, berupa artikel ilmiah dari penelitian-penelitian yang diselenggarakan.

Menjadi rahasia umum, atau temuan sementara ini, bahwa banyak jurnal yang terbit di level nasional, artikel-artikelnya tidak didahului dan tidak berdasarkan riset yang mendalam. Sementara itu hibah-hibah riset di level PTKI dibawah payung Kementerian Agama RI terus berjalan setiap tahunnya. Ada diskoneksi antara publikasi jurnal dan riset. Banyak riset tidak melahirkan publikasi jurnal, sedangkan di sisi lain banyak jurnal terbit yang artikelnya tidak berdasarkan riset. Banyak artikel-artikel hanya berdasarkan ringkasan matakuliah, opini, kontemplasi tanpa penelitian lapangan atau pustaka. Ini bisa dilihat di Moraref.or.id. Maka Ini merupakan gap yang perlu diisi dan diselesaikan oleh Kementerian Agama RI terutama dalam bidang riset dan publikasi. Bagaimana menghubungkan dua unsur tadi, riset dan publikasi, sehingga menjadi program yang berkesinambungan dan terukur.

Untuk itu bisa disimpulkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. penelitian dilakukan terus menerus setiap tahun sesuai dengan anggaran tanpa adanya monitoring publikasi baik nasional atau internasional;
2. penelitian dilakukan terus menerus tanpa kontrol dan kendali dari pihak donatur/Kementerian Agama RI yang memadahi dan efektif;
3. penelitian terus menerus dilakukan setiap tahunnya tanpa koordinasi antara dana dan hasil riset, yakni publikasi;
4. penelitian terus menerus tanpa studi dampak penelitian secara nasional atau internasional;
5. penelitian bersifat prosedural dan formalitas dengan adanya pelaporan tahunan secara dana dan finansial; dan/atau
6. penelitian bersifat administratif dan keuangan belum bersifat akademik.

Untuk menjawab persoalan diatas, dan atas persoalan yang telah terindetifikasi maka diperlukan langkah-langkah yang bisa menjadi solusi sebagai berikut:

1. menghubungkan penelitian dan publikasi, setiap penelitian terkawal dan terkontrol agar melahirkan publikasi di tingkat nasional atau internasional;
2. setiap hasil penelitian hendaknya terpublikasikan di jurnal terindeks nasional atau internasional bereputasi;

3. penelitian yang berdampak dari segi publikasi di dunia akademik internasional dan nasional, juga berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. penelitian yang benar-benar dilakukan dan terukur sesuai dengan target, atas kontrol dari kementerian agama dengan manajemen dan metode tertentu;
5. memonitor penelitian secara akademik dan publikasi ilmiah;
6. melaporkan penelitian dari segi dana dan akademik; dan
7. penelitian berdampak pada skala nasional dan internasional untuk reputasi indonesia yang beragam dan harmonis.

## **B. Komponen Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang disponsori oleh lembaga-lembaga *funding* internasional, baik dilakukan oleh universitas-universitas dunia, atau lembaga *funding* non-universitas, mekanisme dan kontrol dilakukan oleh sesama peneliti, atau istilahnya *peer review*. Dalam ARKAN 2018 – 2028 ini diprogramkan dalam bentuk *research leader* (peneliti kepala), yang bertanggungjawab dalam memimpin kluster dan memonitor penelitian dan publikasi hasil penelitian. Kita bisa merujuk istilah ini dari *Asia Research Institute (ARI)* di *National University of Singapore (NUS)*. Istilah *research leader* digunakan bagi peneliti yang memimpin dengan catatan dan reputasi yang bisa meyakinkan para peneliti lainnya, sehingga dijadikan contoh dan standar bagi peneliti lain. Begitu juga kita dapati dalam cluster *research* yang sukses, *Dynamics in the History of Asia and Europe* di *Bochum University*, juga menggunakan cluster yang dipimpin oleh seorang peneliti senior yang mengarahkan penelitian juga memimpin publikasi hasil penelitian. Publikasi menjadi ukuran utama penelitian, grade dan evaluasi didasarkan pertimbangan ini.

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya kluster berdasarkan tema setiap penelitian, skala prioritas, dan juga metode monitoring. *Research leader* (pimpinan penelitian) diangkat untuk memimpin proses penelitian juga sekaligus mengawasi dan mengontrol setiap penelitian. *Research leader* ini bertanggungjawab pada Kementerian Agama RI, khususnya Kasubdit Publikasi dan Penelitian dan dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi. *Research leader* secara bersama-sama melakukan penelitian dengan peneliti juga sekaligus mengawasi mereka. Idealnya, *research leader* adalah peneliti yang telah berpengalaman dalam publikasi nasional atau internasional yang bereputasi, dilihat dari CV-nya. *Research leader* telah menerbitkan artikel-artikelnya, atau buku-bukunya di level internasional. Ini bisa dilihat catatan *research leader* di web-web seperti Google.scholar, Sinta, Scopus, Researchgate, Academia, dan lain-lain. Maka komponen riset sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI sebagai pemberi hibah juga sekaligus pengawas penelitian dan pelaporan;

2. *Reviewer* sebagai penyeleksi awal dari proposal-proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan proposal, ini juga bisa dilibatkan atau dirangkap oleh *research leader*;
3. *Research leader* merupakan pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi ilmiahnya di web-web science. *Research leader* bertugas memimpin dan mengawasi penelitian dan mempunyai anggota para peneliti. Selain itu, *Research leader* juga bertugas mengawasi dan membimbing penelitian sampai dengan publikasi; dan
4. Peneliti yaitu penerima dana bekerja dibawah arahan *research leader* dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Sedangkan dari segi langkah dan kegiatan (aktivitas) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan Seleksi Proposal,  
Pengajuan proposal dapat dilakukan oleh semua dosen PTKI. Sedangkan pelaksanaan seleksi proposal dapat dilakukan oleh *reviewer* dan *research leader*. Namun demikian, Kementerian Agama dapat terlebih dahulu menentukan *research leader* yang bertindak sebagai *reviewer* dan yang akan memilih anggota peneliti.
2. Penelitian  
Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh para peneliti yang proposalnya lulus seleksi dan diterima setelah melalui proses seleksi antara *reviewer* dan *research leader*. Namun, penelitian dipimpin dan tema ditentukan oleh *research leader*. *Research leader* akan mengacu pada ARKAN 2018 – 2028, sesuai dengan agenda yang dicanangkan selama 10 tahun.
3. Monitoring dan Evaluasi  
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola pelaksanaan penelitian dan dapat juga dilakukan oleh *research leader* atas nama Kementerian Agama RI. Pihak pejabat Kementerian juga terlibat dalam monitoring ini, baik itu proses penelitian di lapangan, laboratorium, atau pencarian sumber manuskrip di museum atau perpustakaan.
4. Publikasi  
Peneliti mempunyai tanggungjawab dalam publikasi, dan dibawah arahan *research leader*.

Untuk meningkatkan penelitian perlu kiranya diterangkan komponen-komponen penting agar lebih jelas sebagai berikut:

#### **1. Peneliti (Researcher)**

Peneliti adalah dosen atau peneliti PTKI yang mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan dan syarat dan dinyatakan lolos dalam seleksi proposal. Kriteria proposal peneliti diukur dengan kualitas proposal yang meyakinkan dan menjanjikan publikasi. Publikasi ini juga dibagi menjadi publikasi

nasional dan internasional yang akan menentukan grading dan dana penelitian. Peneliti berhak mendapatkan dana hibah dari Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tema-tema penelitian dan prioritas tema tertentu merujuk pada agenda ARKAN 2018 – 2028 yang ditafsirkan oleh *research leader*. *Research leader* menterjemahkan tema-tema tertentu dan membimbing peneliti untuk melakukan pengumpulan data baik di laboratorium, *experiment* kelompok, maupun di lapangan untuk etnografi. Peneliti bertanggungjawab pada *research leader* yang membimbing untuk membuat laporan data atau rumusan hasil tertentu sehingga menghasilkan publikasi nasional atau internasional.

2. Penilai proposal (*Reviewer*)

*Reviewer* adalah penyeleksi proposal yang masuk dari peneliti. *Reviewer* dengan kriteria tertentu menyeleksi proposal dan mensyahkan untuk mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Disini *reviewer* bisa dipandu atau dirangkap oleh peran *research leader*.

3. *Research leader*

*Research leader* adalah pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi dan pengalaman riset yang akan memimpin kluster penelitian berisi para anggota peneliti. *Research leader* diutamakan bagi mereka yang mempunyai catatan publikasi internasional yang bisa dilihat dari web-web ilmiah seperti: *Google Scholar*, *Sinta*, *Scopus*, *Academia*, *Researchgate*, dan lain-lain. *Research leader* berkewajiban membimbing anggota peneliti dan menerjemahkan penelitian dan topik dari ARKAN 2018 – 2028.

Peran *research leader* sangat penting untuk keberhasilan penelitian, karena dengan *research leader* yang berpengalaman dalam publikasi dan reputasi internasional, pelaksanaan penelitian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target pendapaian ARKAN 2018 – 2028. Pemilihan *research leader* hendaknya didasarkan pada produktivitasnya dalam bidang penelitian dan publikasi yang dituangkan di dalam *curriculum vitae* (CV), misalnya tiga tahun terakhir dalam kegiatan *research leader* dalam bentuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi dan buku-buku *publisher* bereputasi. *Research leader* akan mendorong publikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### C. Pelaksanaan Penelitian

Yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya meneliti suatu obyek atau subyek secara ilmiah dengan teori dan metodolgi untuk menghasilkan *outcome* dan *output* yang terukur dan hasil yang disertai publikasi ilmiah di jurnal ilmiah atau buku di *publisher* berputasi. Penelitian di Kementerian Agama RI mencakup penelitian bidang sosial,

humaniora, sains dalam laboratorium, percobaan atau eksperimen. Dalam bidang sains penelitian melibatkan team tertentu atau hanya individu yang menghasilkan rumusan hasil atau target tertentu yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam bidang tertentu. Penelitian bidang sosial dan humaniora dengan teori dan metode tertentu untuk menghasilkan tafsir atau keterangan terhadap kasus atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Dana hibah Kementerian Agama dimaksudkan untuk menopang penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dosen, dan segenap sivitas akademika PTKI untuk tujuan publikasi dan juga berdampak bagi masyarakat, baik berupa teknologi, pengetahuan, atau skill tertentu.

Penelitian disamping bisa diukur dengan metode dan teori juga harus menghasilkan publikasi, HKI, paten dengan ukuran yang diterima untuk kalangan ilmiah. Penelitian- penelitian di Indonesia ini tentu harus bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain dilakukan oleh cendekiawan atau ilmuwan dunia di negara-negara lain untuk mengukur capaian. Tradisi panjang Inggris misalnya bisa dilihat dalam Royal Asiatic Society. Tradisi Amerika dengan banyak himpunan-himpunan peneliti, cendekiawan, pengamat dan analis. Penelitian di Kementerian Agama RI juga diharapkan mampu meningkatkan publikasi nasional di mata internasional dan juga berdampak bagi perkembangan masyarakat, negara dan dunia politik, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan manusia. Penelitian juga bisa menghasilkan upaya pendidikan dan tujuan moral agama yang digunakan untuk kontrol kemajuan masyarakat. Penelitian tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pragmatis masyarakat, atau tujuan politis tertentu, tetapi mempunyai jangka panjang dalam bidang ilmiah, dengan teori dan metode yang terukur. Penelitian yang baik bisa diulangi dengan metode yang sama. Penelitian juga harus menggambarkan kejujuran dan spesifikasi bidang peneliti.

Penelitian di Kementerian Agama RI dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi dan peran PTKI dalam dunia ilmiah. Dalam hal ini publikasi menjadi sentral dan perlu mendapat perhatian. Kementerian Agama RI mempunyai cara tersendiri mengukur ini sesuai dengan standar nasional dan internasional. Penelitian dibagi menjadi penelitian level internasional dengan target publikasi internasional di jurnal atau buku internasional dan penelitian level nasional. Yang dimaksud dengan jurnal internasional adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh di Kemenristekdikti sesuai dengan akredistasi jurnal (SINTA). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Penelitian nasional diukur dengan publikasi di jurnal nasional akreditasi B (SINTA 2), atau buku kelas publisher nasional;
2. Penelitian internasional diukur dengan publikasi di jurnal internasional dengan akreditasi A (SINTA 1), atau index semacam Scopus, Web of Science, dan lain-lain;
3. Penelitian pengabdian masyarakat/CBR adalah penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat



#### D. Pendanaan Riset Dalam ARKAN 2018 - 2028

Jika proyek anggaran RIRN untuk jangka waktu tiga tahun adalah Rp. 100 triliun, dengan asumsi masing-masing fokus riset mendapatkan anggaran Rp. 10 triliun/tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk riset prioritas keagamaan adalah  $\frac{1}{2}$  dari anggaran fokus Riset Sosial Humaniora-Seni Budaya dan Pendidikan (Rp. 5 Triliyun). Sehingga jika ARKAN 2018 – 2028 diagendakan 10 tahun berarti diperlukan biaya Rp. 16 Triliyun.

Komposisi alokasi untuk anggaran yang direncanakan, berdasarkan kelompok makro riset yang dikaitkan dengan 4 (empat) fokus riset keagamaan (ARKAN 2018-2028) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Pembiayaan Riset Unggulan ARKAN 2018-2028**

Fokus Riset	Lembaga	Anggaran
Studi Islam	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 2 Triliyun
Pluralisme dan Keragaman	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 7 Triliyun
Integrasi Keilmuan	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 4 Triliyun
Kemajuan Globalisasi	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 3 Triliyun

Penetapan target anggaran tersebut adalah untuk menunjang upaya merangsang pertumbuhan kapasitas produksi nasional dan juga meningkatkan rasio anggaran pemerintah untuk bidang riset terhadap PDB (harga berlaku) di Indonesia. Selama ini anggaran riset PTKI sebesar 250 milyar pertahun. 20% dialokasikan di pusat sedangkan sisanya ada di tiap perguruan tinggi

#### E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah upaya untuk melihat perkembangan proses penelitian baik dari sisi akademik maupun keuangan, yang menyangkut bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian yang baik merujuk pada metode dan teori yang ada dan berkembang dalam bidang pengetahuan tertentu. *Research leader* dalam hal ini bertanggung jawab untuk memilih tema, membimbing proses penelitian, dan mengarahkan ke publikasi yang bereputasi. Monitoring adalah kerjasama antara pihak Kementerian Agama RI dan *research leader*.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya sistemik dan terencana yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen untuk betul-betul memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan

rencana dan menghasilkan output yang menjadi tagihan akhir penelitian yang dilakukan. Sama dengan monitoring, evaluasi juga dilakukan dalam ranah akademik dan keuangan sehingga bisa dipastikan bahwa anggaran yang sudah diberikan efektif pemanfaatannya dan outputnya bisa memberikan dampak yang positif untuk berbagai pihak baik dalam jangka pendek maupun panjang.

#### **F. Laporan dan Publikasi**

Laporan penelitian merujuk pada *output* dan *outcome*, yaitu sejauh mana proses publikasi berjalan. Laporan output berupa proses submit ke jurnal yang dituju. Outcome berupa publikasi itu sendiri. Laporan narasi ini didukung juga dengan laporan keuangan sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan. Khusus untuk laporan narasi, harus menunjukkan rencana publikasi dan menunjukkan draft untuk publikasi di jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan publikasi adalah hasil yang dicapai dalam penelitian dalam bentuk artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Publikasi juga berupa buku oleh publisher bereputasi baik nasional maupun internasional. Jurnal nasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi Kemristekdikti B (SINTA 2), dalam hal ini SINTA membagi menjadi 6 level publikasi jurnal di Indonesia. Jurnal internasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi A Kemristekdikti atau terindeks bereputasi (SINTA 1). Salah satu indeks misalnya Scopus, Web of Science Thomson Reuters dan lain-lain sesuai dengan bidang yang sesuai.

Publikasi adalah inti dan tujuan dari penelitian karena dengan itu bisa diukur dampaknya dalam bidang kecerdasan nasional dan internasional. Paten dan HAKI juga bisa menjadi output dan outcome selain publikasi.

## **BAB VI PENUTUP**

ARKAN 2018 – 2028 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian dan publikasi serta pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan Kementerian Agama RI. Para peneliti dan lembaga penyelenggara penelitian diharapkan dapat menjadikan ARKAN 2018 – 2028 ini sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan, memodifikasi dan mengembangkan tema-tema pokok penelitian sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam ARKAN 2018 – 2028 ini.

Tentu saja modifikasi dan inovasi masih terus diharapkan, walaupun ARKAN 2018 – 2028 ini merupakan arah awal penelitian. Penelitian yang baik selalu menghasilkan temuan-temuan baru dan mengkritisi teori dan temuan lama. Dengan ARKAN 2018 – 2028 ini Kementerian Agama RI yang memayungi PTKI di seluruh Indonesia akan menyumbangkan ini pada perkembangan ilmu dan sains di negeri ini. Islam Indonesia sehingga bisa dikenal dunia, masyarakat Indonesia menjadi sumber inspirasi pengetahuan, dan para ilmuwan Indonesia mengglobal dan sejajar dengan para ilmuwan lain dari negara lain.

Karena wilayah ARKAN 2018 – 2028 adalah penelitian yang berbasis PTKI maka output dan outcome ARKAN 2018 – 2028 prioritas pertama adalah publikasi, baik berupa jurnal maupun buku-buku ilmiah, pada level nasional dan internasional. Dalam hal ini ARKAN 2018 – 2028 menyumbang dua masyarakat sekaligus, yaitu: *pertama*, masyarakat akademis dunia, supaya mempromosikan studi tentang keagamaan dan keragaman di Indonesia yang akan menyumbang dunia ilmiah; dan *kedua*, masyarakat secara umum, agar hasil-hasil penelitian dari berbagai teman, bidang, dan disiplin mampu membawa masyarakat Indonesia secara khusus agar lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat dari segi pangan, pengetahuan, sains, dan teknologi.

*Akhirul kalam*, semoga kehadiran ARKAN 2018 – 2028 ini dapat melahirkan riset-riset keagamaan unggulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kehidupan akademik yang inovatif dan umat yang lebih berkeadilan, toleran, moderat, sejahtera, dan berdaulat.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN